

Pengaruh UMR, AMH dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2015-2025

Muhammad Danial Firdaus Musyafak¹, Husnurrosyidah^{2*}

^{1,2*}Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Sunan Kudus, Kudus, Indonesia

Email: ¹musyafakdanial@gmail.com, ^{2*}husnurrosyidah@uinsuku.ac.id

Informasi Artikel

Submitted : 05-06-2026

Accepted : 10-07-2026

Published : 15-08-2026

Keywords:

Regional Minimum Wage

Literacy Rate

Unemployment Rate

Poverty

Java Island

Abstract

This study aims to analyze the effect of Regional Minimum Wage (RMW), Literacy Rate, and Unemployment Rate on poverty levels in Java Island during 2015–2025. The research employs a quantitative approach with a correlational design. The data used are panel data covering six provinces in Java Island from 2015 to 2025. Data analysis was conducted using panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM), selected based on the Chow Test and Hausman Test results. The findings indicate that simultaneously, RMW, Literacy Rate, and Unemployment Rate significantly affect poverty levels in Java Island. Partially, Regional Minimum Wage has a negative and significant effect on poverty, indicating that higher minimum wages contribute to reducing poverty. Literacy Rate also has a negative and significant effect on poverty, suggesting that improvements in education quality can help alleviate poverty. Meanwhile, Unemployment Rate has a positive and significant effect on poverty, implying that higher unemployment tends to increase the number of poor people. These findings highlight that improving workers' welfare, enhancing educational quality, and expanding employment opportunities are essential strategies for poverty reduction in Java Island.

Abstrak

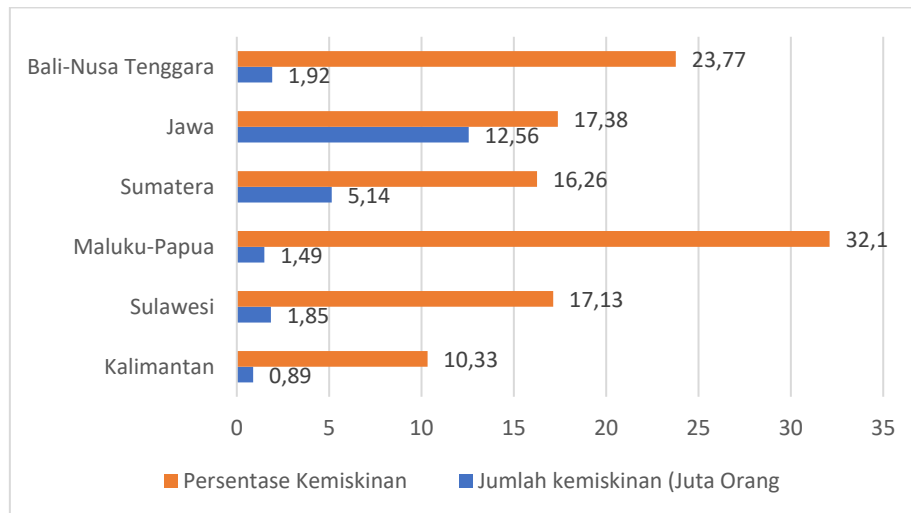
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Regional (UMR), Angka Melek Huruf (AMH), dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2015–2025. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Data yang digunakan merupakan data panel yang mencakup enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2015–2025. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan model Fixed Effect Model (FEM) yang dipilih berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan UMR, AMH, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Secara parsial, UMR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Angka Melek Huruf juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dapat membantu mengurangi kemiskinan. Sementara itu, tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti peningkatan pengangguran cenderung meningkatkan jumlah penduduk miskin. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, kualitas pendidikan, dan perluasan kesempatan kerja merupakan faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Pulau Jawa.

Kata Kunci: Upah Minimum Regional, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, Pulau Jawa.

1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai permasalahan kompleks dari beragam aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah persoalan kemiskinan dan kelaparan. Saat ini di Indonesia tengah melakukan berbagai persiapan dan upaya untuk menyongsong visi “Indonesia Emas” pada tahun 2045. Namun di tengah proses tersebut Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan ekonomi salah satunya yaitu kemiskinan (Sakaria et al., 2025). Di Indonesia kemiskinan masih menjadi masalah yang serius dan terus menjadi fokus utama pusat perhatian (Utami & Faizin, 2025).

Pada tahun 2025 populasi penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen yang berkurang sebesar 210 ribu orang dibandingkan tahun 2024 sebesar 24,06 juta atau setara dengan 8,57 persen (BPS, 2025). Sementara itu dalam upaya mewujudkan “Indonesia Emas” salah satu target yang ditetapkan adalah menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia hingga berada pada kisaran 0,5–0,8 persen. Kondisi kemiskinan di Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Sakaria et al., 2025).



Gambar 1. Jumlah Kemiskinan Dan Persentase Per Pulau Di Indonesia Tahun 2025
Sumber BPS 2025

Pada gambar 1 pada tahun 2025 pulau Jawa menduduki jumlah kemiskinan yang sangat tinggi mencapai 12,56 juta atau 17,38 persen lebih banyak 11,67 juta orang dibanding pulau Kalimantan 0,89 juta atau setara 10,33 persen. Walaupun persentase tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Maluku-Papua sebesar 32,1 persen dan ter rendah di Pulau Kalimantan sebesar 10,33 persen, namun persentase kemiskinan di Pulau Jawa termasuk 3 besar ter Tinggi di Indonesia yang mencapai 17,38 pada tahun 2025 (BPS, 2025). Sebagai kawasan dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia Pulau Jawa memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan nasional (Sa'diyah et al., 2026). Namun adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi antar wilayah seperti tingkat pendidikan, upah minimum regional yang belum merata, dan pengangguran, memicu terjadinya ketimpangan pembangunan yang perlu dikaji secara sistematis.

Menurut Todaro tujuan utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi modern tidak hanya berfokus pada peningkatan PDRB semata. Bahkan lebih dari itu pembangunan juga diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, menekan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan lapangan kerja sebagai bagian dari upaya memajukan perekonomian. Oleh karena itu kemiskinan menjadi masalah penting yang harus segera ditangani. Secara makro tingkat kemiskinan sering digunakan sebagai indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Pengukuran kemiskinan umumnya dilakukan melalui pendekatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam hal ini kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan makanan maupun non-makanan yang terjadi dalam garis kemiskinan serta jumlah penduduk miskin (Sari & Nuraini, 2020).

Menurut World Bank kemiskinan salah satunya disebabkan oleh keterbatasan pendapatan dan kepemilikan aset sehingga individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan serta layanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Selain itu kemiskinan juga berkaitan erat dengan terbatasnya kesempatan kerja. Kelompok masyarakat miskin umumnya tidak memiliki pekerjaan dan memiliki tingkat pendidikan serta kesehatan yang relatif rendah. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah melainkan harus diiringi

dengan upaya penanganan masalah lain yang saling terkait seperti rendahnya pendapatan, upah minimum regional yang belum merata, pendidikan, pengangguran dan berbagai faktor sosial ekonomi lainnya (Kuswanto & Dewi, 2016). Fenomena yang terjadi di Pulau Jawa sejalan dengan teori lingkaran setan kemiskinan Ragnar Nurkse, yang menyatakan bahwa kemiskinan cenderung berulang (Joya, 2025). Pada hal ini UMR yang belum merata dan tingginya pengangguran menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat yang kemudian menghambat investasi pada kualitas SDM (angka melek huruf) sehingga menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Serta dapat dikaitkan dengan teori Teori Human Capital yang di perkenalkan Theodore Schultz dan Gary Becker pada tahun 1960-an yang menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Becker individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang lebih baik sehingga memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan terhindar dari kemiskinan (Surbakti et al., 2023).

Penelitian mengenai pengaruh UMR terhadap tingkat kemiskinan dilakukan oleh Sulistiawan hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa peningkatan upah minimum cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan (Sulistiawan, 2023). Hasil yang sama juga ditunjukkan pada penelitian Oktaviana dkk hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Karena semakin tinggi upah minimum maka pendapatan masyarakat juga cenderung meningkat. Peningkatan pendapatan tersebut dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga membantu mengurangi bahkan menghindarkan masyarakat dari kemiskinan (Oktaviana et al., 2021). Selaras dengan penelitian Dongoran dkk Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai pengaruh upah minimum regional terhadap persentase penduduk miskin. Upah minimum regional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum regional berpengaruh dengan penurunan persentase penduduk miskin (Dongoran et al., 2023). Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabyan dan widyanti yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sebesar apapun upah minimum regional jika sumber daya manusia tidak memiliki skill atau pendidikan yang dibutuhkan di dunia karir, maka sebesar apapun Upah minimum regional tidak berpengaruh pada tingkat kemiskinan (Sabyan & Widyanti, 2022).

Penelitian mengenai pengaruh angka melek huruf terhadap tingkat kemiskinan dilakukan oleh Lavenia dkk menunjukkan angka melek huruf terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan angka melek huruf berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (Lavenia et al., 2023). Hasil yang sama juga ditunjukkan pada penelitian Yoga dkk menunjukkan angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan angka melek huruf dapat menurunkan tingkat kemiskinan karena kualitas sumber daya manusia juga semakin meningkat (Yoga et al., 2022). Selaras dengan penelitian Harbain dan Harahap menunjukkan angka melek huruf terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan angka melek huruf berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (Harbain & Harahap, 2024).

Penelitian mengenai pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan dilakukan oleh Putri dan Hutabarat tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka tingkat kemiskinan di wilayah tersebut juga cenderung meningkat (Putri & Hutabarat, 2022). Hasil yang sama juga ditunjukkan pada penelitian Tirta dan Putri menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu daerah maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut juga cenderung meningkat (Tirta & Putri, 2025). Hasil yang sama juga ditunjukkan pada penelitian

Angelia dan Anitasari Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka tingkat kemiskinan juga cenderung meningkat (Angelia & Anitasari, 2025). Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari serta Imaningsih bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua individu yang menganggur termasuk dalam kategori miskin. Dalam beberapa kasus kebutuhan mereka tetap dapat terpenuhi karena adanya anggota keluarga lain yang memiliki penghasilan cukup tinggi. Selain itu individu yang dianggap menganggur juga bisa saja sebenarnya masih memiliki aktivitas ekonomi di sektor informal (Lestari & Imaningsih, 2022).

Berlandaskan berbagai penelitian yang telah dibuktikan oleh peneliti terdahulu masih adanya ketidak konsistenan pada hasil penelitian mengenai pengaruh UMR dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu penelitian terdahulu mengenai pengaruh UMR terhadap tingkat kemiskinan di pulau Jawa sebelumnya sering kali berfokus pada variabel tingkat pengangguran terbuka, tingkat kesehatan, IPM, PDRB dan tingkat pendidikan. Sehingga masih diperlukan pengujian yang lebih terfokus dengan menempatkan UMR, angka melek huruf, dan tingkat pengangguran secara bersamaan dalam satu model analisis.

Penelitian ini berfokus pada kasus kemiskinan di Pulau Jawa karena pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat berpotensi mendorong kenaikan tingkat kemiskinan. Selain itu penggunaan periode penelitian 2015–2025 memberikan pembaruan data empiris yang lebih mutakhir dibandingkan penelitian terdahulu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pemerintah provinsi atau Gubernur yang ada di Pulau Jawa mengenai pengaruh-pengaruh yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pembuktian empiris yang lebih jelas mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2015-2025.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional, yaitu penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar satu variabel atau lebih dengan variabel lain (Hasbi et al., 2023). Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi proses pengolahan dan analisis terhadap hasil perhitungan data yang telah diperoleh. Data yang digunakan adalah data panel, yaitu gabungan antara data cross section (silang) dan time series (runtut waktu) yang mencakup beberapa objek penelitian dalam beberapa periode waktu, sehingga memiliki karakteristik yang lebih kompleks dalam penelitian (Damodar, N. Gujarati & Dawn, 2012). Data panel dalam penelitian ini disusun berdasarkan sampel yang telah ditetapkan, yaitu mencakup 6 Provinsi di Pulau Jawa selama periode 2015–2025. Pengolahan data menggunakan *software Microsoft Exel* dan *Eviews 8*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada tingkat kemiskinan di pulau Jawa periode 2015-2025 sebagai objek penelitian. Menurut Todaro tujuan utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi modern tidak hanya berfokus pada peningkatan PDRB semata. Bahkan lebih dari itu pembangunan juga diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, menekan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan lapangan kerja sebagai bagian dari upaya memajukan perekonomian. Oleh karena itu kemiskinan menjadi masalah penting yang harus segera ditangani.

Secara makro tingkat kemiskinan sering digunakan sebagai indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Pengukuran kemiskinan umumnya dilakukan melalui pendekatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam hal ini kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik

kebutuhan makanan maupun non-makanan yang terjadi dalam garis kemiskinan (Sari & Nuraini, 2020). Penelitian ini berfokus pada kasus kemiskinan di Pulau Jawa karena pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat berpotensi mendorong kenaikan tingkat kemiskinan.

pada tahun 2025 Pulau Jawa menduduki jumlah kemiskinan yang sangat tinggi mencapai 12,56 juta atau 17,38 persen lebih banyak 11,67 juta orang dibanding pulau Kalimantan 0,89 juta atau setara 10,33 persen. Walaupun persentase tertinggi di Pulau Maluku-Papua sebesar 32,1% dan terendah di Pulau Kalimantan, namun persentase kemiskinan di Pulau Jawa termasuk 3 besar tertinggi di Indonesia yang mencapai 17,38 pada tahun 2025 (BPS, 2025). Berdasarkan data yang diperoleh dari badan pusat statistik (BPS), data tingkat kemiskinan diseluruh provinsi yang ada di Indonesia dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini. Selanjutnya, dari populasi tersebut dilakukan pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Pengaruh Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa pada Tahun 2015-2025.

Upah minimum regional (UMR) merupakan kebijakan pemerintah yang menetapkan batas minimum penghasilan yang harus diterima oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 dan menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia (Abdi et al., 2024). Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa upah minimum regional (X_1) memiliki nilai t hitung sebesar $-3,736529 > t$ tabel yaitu 1,99773 dan nilai sig $0,0004 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima, yang berarti upah minimum regional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di pulau Jawa. Daerah dengan UMR tinggi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Namun di Pulau Jawa masih terdapat kesenjangan UMR yang cukup besar antar provinsi maupun antar daerah. Sebagai contoh, rata-rata UMR di pulau Jawa pada periode 2015-2025 tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata sebesar 4.131.374, disusul Provinsi Banten dengan rata-rata sebesar 2.309.088, Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata sebesar Rp 1.780.086, Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata sebesar 1.756.755, Provinsi DI Yogyakarta dengan rata-rata sebesar 1.703.351 dan UMR terendah di Provinsi Jawa tengah dengan rata-rata sebesar 1.688.686. Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan rata-rata UMR terendah pada periode 2015-2025 dibandingkan lima provinsi lainnya di Pulau Jawa

Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius mengingat Upah Minimum Regional (UMR) merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat pengeluaran individu dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, rekreasi, keamanan dan lain sebagainya. Upah memiliki peran penting dalam menentukan kondisi ekonomi suatu rumah tangga, apakah rumah tangga tersebut tergolong miskin atau tidak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan penetapan upah minimum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika upah pekerja meningkat, daya beli masyarakat ikut meningkat sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik dan risiko kemiskinan dapat ditekan. Oleh karena itu pemerintah perlu mempertimbangkan penetapan upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak agar dapat mendukung pengurangan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

Kebijakan kenaikan upah minimum dapat dikaitkan dengan teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) pertama kali diperkenalkan oleh Ragnar Nurkse pada tahun 1953. Teori ini menggambarkan kemiskinan sebagai suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus di mana kondisi tersebut berulang dalam pola yang sama tanpa adanya titik akhir (Nurhidayah & Atieq, 2025). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawan hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Hal ini berarti bahwa peningkatan upah minimum cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan (Sulistiawan, 2023).

Pengaruh Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Pada Tahun 2015-2025.

Membaca merupakan suatu proses yang berperan dalam meningkatkan kemampuan kognitif (pengetahuan) setiap individu. Perkembangan kognitif tersebut dapat tercermin dari berbagai aktivitas yang dilakukan. Sejumlah ahli menyatakan bahwa angka melek huruf merupakan indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di suatu negara atau daerah (Harbain & Harahap, 2024). Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa angka melek huruf (X_2) memiliki nilai t hitung sebesar t hitung sebesar $-4,828453 > t$ tabel yaitu $1,99773$ dan nilai sig $0,0000 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima, yang berarti angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di pulau Jawa. Meskipun rata-rata angka melek huruf di Pulau Jawa sangat tinggi yaitu di atas 99 persen, realita di lapangan menunjukkan bahwa kualitas pendidikan masih belum merata. rata-rata tingkat melek huruf tertinggi di pulau Jawa selama periode 2015–2025 terdapat di Jawa Barat dengan angka mencapai 99,97 persen, disusul dengan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 99,95 persen, Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,95 persen, Provinsi Banten sebesar 99,94 persen, Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,92 persen dan yang terendah berada di Provinsi Jawa Timur sebesar 99,90 persen. Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan rata-rata angka melek huruf terendah pada periode 2015-2025 dibandingkan lima provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Kondisi ini terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan perkembangan di sektor pendidikan secara memadai. Akibatnya sebagian masyarakat yang masih buta huruf tidak memiliki keterampilan dan keahlian yang cukup. Masyarakat yang memiliki kemampuan membaca dan menulis umumnya lebih mudah memperoleh akses terhadap pendidikan, informasi dan peluang kerja yang lebih baik. Dalam teori Human Capital atau modal manusia merupakan konsep yang mengacu pada kumpulan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki individu sebagai aset berharga dalam dirinya. Konsep tersebut dapat ditingkatkan melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan, serta pengalaman kerja (Arbianti & Suchaina, 2025). Peningkatan angka melek huruf juga dapat dikaitkan dengan teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) pertama kali diperkenalkan oleh Ragnar Nurkse pada tahun 1953. Teori ini menggambarkan kemiskinan sebagai suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus di mana kondisi tersebut berulang dalam pola yang sama tanpa adanya titik akhir (Nurhidayah & Atieq, 2025).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lavenia dkk menunjukkan angka melek huruf terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan angka melek huruf berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (Lavenia et al., 2023).

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2015-2025.

Tingkat pengangguran merupakan persentase individu yang termasuk dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, namun belum berhasil memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Awalia & Husnurrosyidah, 2024). Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran (X_3) memiliki nilai t hitung sebesar $3,668354 > t$ tabel yaitu $1,99773$ dan nilai sig $0,005 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima, yang berarti tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di pulau Jawa.

Realita di lapangan menunjukkan bahwa Banten memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Pulau Jawa pada tahun 2015-2025 yaitu sebesar 8,45 persen, disusul dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 8,33 persen, Provinsi DKI Jakarta sebesar 7,19 persen, Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,06 persen, Provinsi Jawa Timur sebesar 4,59 persen, Provinsi DI Yogyakarta sebesar 3,65 persen. Secara umum tingkat pengangguran di wilayah Pulau Jawa mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Rendahnya tingkat pengangguran berpotensi menurunkan tingkat penduduk miskin terutama jika didukung oleh faktor lain seperti upah minimum regional, pendidikan, serta ketersediaan lapangan kerja yang memadai dan merata antarwilayah. Sebaliknya peningkatan tingkat pengangguran cenderung mendorong tingkat kemiskinan. Pengangguran turut memengaruhi tingkat kemiskinan melalui berbagai mekanisme ekonomi. Pada rumah tangga yang memiliki keterbatasan likuiditas tingkat konsumsi sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh.

Berdasarkan hasil temuan di atas, dapat dikaitkan dengan teori yang digunakan sebagai landasan utama dalam penelitian ini yaitu Teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) pertama kali diperkenalkan oleh Ragnar Nurkse pada tahun 1953. Teori ini menggambarkan kemiskinan sebagai suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus di mana kondisi tersebut berulang dalam pola yang sama tanpa adanya titik akhir (Nurhidayah & Atieq, 2025). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hutabarat tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka tingkat kemiskinan di wilayah tersebut juga cenderung meningkat (Putri & Hutabarat, 2022).

4. KESIMPULAN

Variabel upah minimum regional menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Hal ini berarti bahwa peningkatan upah minimum regional mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara nyata. Semakin tinggi upah minimum yang diterapkan maka pendapatan masyarakat khususnya para pekerja cenderung meningkat sehingga kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi lebih baik. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tingkat penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dapat berkurang. Oleh karena itu kebijakan penetapan upah minimum regional memiliki peran penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Sulistiawan, Oktaviana dkk serta penelitian Dongoran dkk.

Variabel angka melek huruf menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Hal ini berarti bahwa peningkatan angka melek huruf dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara nyata. Semakin tinggi kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis maka kualitas sumber daya manusia juga semakin baik sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh pendidikan, informasi, dan peluang kerja yang lebih layak. Kondisi tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat penduduk miskin cenderung menurun. Dengan demikian peningkatan angka melek huruf menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Lavenia dkk, Yoga dkk serta penelitian Harbain dan Harahap.

Variabel tingkat pengangguran menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Hal ini berarti bahwa peningkatan tingkat pengangguran akan menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat secara nyata. Semakin banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan maka semakin besar pula jumlah masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan tingkat penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian pengurangan tingkat pengangguran menjadi salah satu langkah

penting dalam upaya menekan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Putri dan Hutabarat, Tirta dan Putri serta penelitian Angelia dan Anitasari.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Upah Minimum Regional (UMR), angka melek huruf, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2015–2025, maka peneliti memberikan beberapa saran bagi pihak-pihak terkait. Pemerintah daerah di Pulau Jawa diharapkan dapat menetapkan kebijakan Upah Minimum Regional (UMR) yang lebih memperhatikan kebutuhan hidup layak masyarakat, pemerintah pusat diharapkan terus meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas lapangan pekerjaan serta pemerataan pendapatan agar upaya pengurangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi tingkat kemiskinan seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, kesehatan, maupun investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M., Zai, B., & Sihombing, R. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, IPM dan UMR Terhadap TPT di Provinsi Sumatera Utara Periode 2011 – 2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 205–216. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3090>
- Angelia, F., & Anitasari, M. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia , Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2014-2022. *Jurnal Ranahresearch*, 7(4), 2796–2806. <https://doi.org/10.38035/rrj>.
- Arbianti, S., & Suchaina. (2025). Peran Pendidikan dan Kesehatan dalam Mengurangi Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Human Capital. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 15(1), 54–64. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jequ.#####>
- Awalia, Q. A., & Husnurrosyidah. (2024). IPM Ditinjau dari Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, dan Pendapatan Asli Daerah Eks- Karesidenan Pati. *JEBISKU*, 2(2), 191–203.
- BPS. (2025). *Prof il Kemiskinan di Indonesia Maret 2025*. 63(7).
- Damodar,N.Gujarati, & Dawn, C. P. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.
- Dongoran, F. R., Sulfina, S. D., Syah, S. A., & Siahaan, T. (2023). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 1(2), 198–207. <https://doi.org/10.47233/jemb.v1i2.671>
- Harbain, & Harahap, M. H. (2024). Analisis Pengaruh Angka Melek Huruf Dan Angka Harapan Hidup Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *ECONOMIC DEVELOPMENT PROGRESS*, 3(2), 103–115.
- Hasbi, A. Z. El, Damayanti, R., Hermina, D., & Mizani, H. (2023). PENELITIAN KORELASIONAL (Metodologi Penelitian Pendidikan). *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), 784–808.
- Joya, M. R. E. P. (2025). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta. *PADMA EKAPITA*, 2(1), 41–47.
- Kuswantoro, & Dewi, I. G. P. (2016). Analisis Tingkat Pendidikan, Pdrb dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 18–35.

- Lavenia, L., Mandai, S., & Lutfi, M. Y. (2023). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk dan Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2021. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 319–328. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15412>
- Lestari, I. T., & Imaningsih, N. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. *JURNAL MANAJEMEN*, 14(4), 739–746.
- Nurhidayah, A. P., & Atieq, M. Q. (2025). Dinamika Islamic Human Development Index, ketenagakerjaan, dan kemiskinan: Peran pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(2), 477–496. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i2.1973>
- Oktaviana, D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM KABUPATEN, DAN PENGANGGURAN, TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN MADIUN. *Syntax Idea*, 3(5), 1034–1049. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i5.1183>
- Putri, T. L., & Hutabarat, R. E. (2022). Analisis Pengaruh Pengangguran, Penanaman Modal dalam Negeri, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 66–77.
- Sa'diyah, K., Primadhieta, K. D., & Rosyid, H. Al. (2026). Clustering Wilayah Pulau Jawa Berdasarkan Indikator Sosial Ekonomi Menggunakan Metode K-Means. *JATI*, 10(1), 1032–1036.
- Sabyan, M., & Widyanti, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upahminimum Regional Terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. *Menara Ekonomi*, VIII(3), 311–315.
- Sakaria, O. A., Mukti, K. K., & Windi, N. (2025). Makan Bergizi Gratis dalam spiritualitas Vinsensian : Korelasi Pengalaman Santo Vincentius di Châtillon-les- Dombes dalam menyikapi Kemiskinan Masa Kini. *Serikat Kecil*, 2(1), 109–129. <https://doi.org/10.35312/xzh6qs93>
- Sari, J. N. I., & Nuraini, I. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 4(2), 1–15.
- Sulistiawan, A. (2023). PENGARUH UPAH MINIMUM, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI PULAU JAWA. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 7(1), 115–126.
- Surbakti, S. P. P., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2021. *Ecoplan*, 6(1), 37–45. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i1.631>
- Tirta, B. W., & Putri, R. N. H. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timu. *JURNAL EKONOMIKA*, 18(2), 1500–1511. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i2> p-ISSN:
- Utami, R. B., & Faizin, M. (2025). Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2023. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 59–70.
- Yoga, I. M. S., Putra, I. K. T. E., & Utomo, R. B. (2022). Pengaruh Upah Minimum dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Bali. *Sutasoma, Jurnal*, 01(01), 1–12. <https://doi.org/00.00000>